

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagan penelitian terdahulu disusun untuk memberikan gambaran singkat dan terstruktur tentang Studi terdahulu yang relevan dengan topik ini. Tujuannya untuk membantu memahami bagaimana penelitian sebelumnya dalam membangun teori, menemukan celah dalam penelitian, atau menjadi landasan untuk penelitian ini.

Pertama, penelitian dengan judul “Penguatan Kelembagaan Desa Wisata Kreatif untuk Pengembangan UKM yang Berkelanjutan” ditulis oleh Muzakar Isa, Aflit Nuryulia Praswati. Hasil pendidikan masyarakat menunjukkan bahwa pelaku usaha dan pemangku kepentingan kini semakin memahami pentingnya kelembagaan yang kuat guna mendukung pengembangan UKM yang berkelanjutan. Pendampingan dalam penyusunan kelembagaan juga menunjukkan bahwa desa wisata kreatif sudah mempunyai struktur organisasi dan rencana strategis yang semakin baik. Namun, kelurahan tersebut masih memerlukan pendampingan berkelanjutan untuk perbaikan kelembagaan serta dukungan dari beragam disiplin ilmu, misalnya pemasaran UKM, pelatihan akuntansi, pengembangan teknologi, pemasaran desa wisata, serta lainnya (Isa & Praswati, 2023).

Kedua, Penelitian dengan judul “Penguatan Kelembagaan Desa Wisata Melalui Kampanye Sadar Wisata 5.0 Dalam Menciptakan Pariwisata Berkelanjutan” tulisan oleh Agung Sulisty, Tri Eko Yudiandri, Rosalina Nur Annisa, dan Mudiono Mudiono menunjukkan bahwa 85% peserta (51 orang) menyadari pentingnya kampanye sadar wisata untuk memperkuat kelembagaan demi pariwisata berkelanjutan. Pengabdian ini berdampak positif pada pengelolaan pariwisata serta menyelaraskan persepsi masyarakat melalui nota kesepahaman (Sulistyo et al., 2023).

Ketiga, penelitian dengan judul “ Penguatan kelembagaan dan destinasi desa wisata tapak tilas sultan agung, mangunan” ditulis oleh

Tanto Lailam, Awang Daru Murti, Ani Yunita. Pengabdian ini berfokus pada penguatan kelembagaan dan destinasi Desa Wisata Tapak Tilas Sultan Agung Mangunan melalui streaming potensi wisata unggulan via survei dan wawancara. Setelah pemetaan, dilakukan penguatan kelembagaan dan pengelola melalui pelatihan, seperti manajemen desa wisata berbasis masyarakat, komunikasi pariwisata, pemasaran, pelayanan prima, dan studi banding ke Desa Wisata Nglanggeran dan Bleberan. Di sisi lain, destinasi diperkuat dengan menambah wisata agro (bibit kopi), papan informasi di daya tarik wayu goyang, serta legalisasi perkumpulan seni budaya dengan akta notaris (Lailam et al., 2019).

Keempat, penelitian dengan judul “Strategi Pengembangan Desa Wisata melui Penguatan Kelembagaan : Studi Kasus Danau Tangkas” ditulis oleh Dwi Hastuti, Parmadi, Junaidi, Haryadi, Siti Hodijah, Heriberta. Berdasarkan analisis SWOT terhadap pengembangan daya tarik wisata Danau Tangkas, fokus utama adalah pada pengelolaan sistem yang terintegrasi, perbaikan infrastruktur, penguatan kelembagaan, pengembangan SDM, serta pemasaran dan promosi pariwisata. Pembentukan BUMDes yang melibatkan masyarakat bertujuan memperbaiki dan menambah fasilitas pariwisata, meningkatkan daya tarik wisatawan, dan memberikan dampak positif pada ekonomi lokal. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi Desa Wisata Danau Tangkas diharapkan dapat mengoptimalkan daya tarik wisata daerah tersebut (Hastuti et al., 2023).

Kelima, penelitian dengan judul “Peran Kelembagaan Lokal Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Desa Wisata” Menurut Tahrizi Fathul Aliim dan Rudi Saprudin Darwis, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa kelembagaan lokal di sektor pariwisata memiliki peran penting. Kelembagaan ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa wisata, mengembangkan ekonomi lokal, dan mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan. Penulis menyarankan agar kelembagaan lokal bekerja sama dengan pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur, mempromosikan pariwisata secara internasional, dan memperluas

pendidikan pariwisata di tingkat sekolah menengah (Aliim & Darwis, 2024).

Keenam, penelitian dengan judul “Penguatan Kelembagaan BUMDEs Sejahtera Desa Darunu Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara Melalui Penyusunan Awal Laporan Keuangan” ditulis oleh Heidy Pesik, Johannes Herebert Tene, Valensiana, Julita Waney, David Kalao. Dengan hasil kajian literatur menyimpulkan bahwa penguatan penyusunan laporan keuangan awal untuk kelembagaan BUMDes Sejahtera Desa Darunu memberikan dampak positif. Kajian ini mengidentifikasi bahwa masalah utama yang dihadapi adalah minimnya pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan serta pelaporan yang akurat. Solusi berupa pelatihan dan pendampingan menyusun laporan keuangan utama, seperti Neraca 2023, Laporan Laba Rugi 2023, dan laporan laba yang tepat. Solusi berupa pelatihan dan pendampingan Menyusun laporan keuangan utama, seperti Neraca 2023, Laporan Laba Rugi 2023, dan Laporan Laba Rugi 2024. Kesimpulannya, program ini tidak hanya meningkatkan pemahaman pengurus BUMDes terkait pentingnya laporan keuangan tetapi juga membantu membangun dasar yang lebih kuat untuk laporan keuangan ini diharapkan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan, sehingga BUMDes Sejahtera bisa lebih maksimal dalam mendukung kemajuan ekonomi Desa Darunu sebagai desa wisata (Pesik et al., 2024).

Ketujuh, penelitian dengan judul Desain “Kelembagaan BUMDES: Menelaah Kerangka Kerja Analisis dan Pengembangan Kelembagaan BUMDES Maju Bersama, Kabupaten Malang” ditulis oleh Ahmad Zaki Fadlur Rohman dan Muhammad Barqah Prantama. Dengan Hasil evaluasi mengenai desain kelembagaan BUMDes Maju Bersama di Kabupaten Malang menggunakan kerangka kerja Institutional Analysis and Development (IAD) oleh Elinor Ostrom. Pendekatan ini mencakup 3 indikator utama: Biophysical Condition, yaitu potensi fisik dan lingkungan yang dimanfaatkan oleh BUMDes seperti lokasi strategis untuk pengembangan unit usaha seperti pujasera dan klinik; Attributes of

Community, yang menunjukkan pentingnya kepercayaan masyarakat dalam mendukung pengelolaan kelembagaan melalui proses sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa; serta Rules in Use, yang mengacu pada peraturan formal seperti AD/ART untuk mengatur struktur organisasi dan memastikan akuntabilitas pengelolaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa BUMDes Maju Bersama telah berhasil mengembangkan beberapa unit usaha seperti pengelolaan sampah, pujasera, dan klinik, meskipun terdapat tantangan pada unit usaha pertanian yang belum optimal. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh keterbukaan pengelolaan, peran aktif masyarakat, dan pemanfaatan potensi lokal yang sesuai dengan kebutuhan desa. Dalam konteks lebih luas, kajian ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan kelembagaan yang berbasis partisipasi masyarakat untuk mendukung keberlanjutan ekonomi desa (Rohman & Prantama, 2023).

Kedelapan, penelitian dengan judul “Tata kelola inovasi pelayanan publik: dimensi kelembagaan, aktor kebijakan dan masyarakat” ditulis oleh Siti Nur Hapzah, Budi Rianto, M. Husni Tamrin. Dengan hasil Inovasi program *6-in-1* oleh Dispendukcapil Kota Surabaya merupakan upaya tata kelola pelayanan publik berbasis elektronik yang mencakup enam layanan administrasi kependudukan. Program ini berjalan cukup baik, didukung oleh regulasi nasional, kepatuhan pegawai, dan budaya pelayanan responsif. Dispendukcapil sebagai leading sector bekerja sama dengan Diskominfo dalam pengembangan aplikasi. Namun, tantangan utama terletak pada rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap program ini, meskipun sosialisasi dan fasilitas edukasi teknologi telah dilakukan. Partisipasi masyarakat terus meningkat, namun penyediaan informasi yang lebih jelas, seperti diagram alur layanan, perlu dioptimalkan guna meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi program (Hapzah et al., 2020).

Kesembilan, penelitian dengan judul “Pengembangan Desa Olean Sebagai Desa Wisata Edukasi Menuju Wisata Rakyat Berkelanjutan Di Kabupaten Situbondo (Wisata Edukasi Hidroponik Olean)” ditulis oleh Yudhistira Harisandi dan Muhammad Iqbal Anshory. Dengan hasil Hasil

pengembangan Desa Olean menjadi desa wisata edukasi menunjukkan bahwa desa ini mempunyai potensi wisata yang besar, namun masih minim pemahaman oleh masyarakat luas. Melalui inisiatif untuk mengembangkan diri sebagai destinasi wisata edukasi, fokus utama ditempatkan pada hidroponik, yang menawarkan pengalaman unik bagi pengunjung untuk terlibat langsung dalam aktivitas pertanian modern di lingkungan pedesaan. PKM yang dilakukan oleh Universitas Abdurachman Saleh Situbondo menghasilkan beberapa langkah strategis, termasuk pembuatan petunjuk arah menuju lokasi wisata, pengenalan teknik hidroponik, serta kegiatan edukasi bagi anak-anak dan kelompok masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengembangan wisata, Desa Olean berupaya untuk menciptakan pengalaman yang tidak hanya menarik bagi wisatawan tetapi juga bermanfaat bagi komunitas lokal. Kesimpulannya, pengembangan Desa Olean sebagai desa wisata edukasi hidroponik berpotensi guna memperkuat pemahaman masyarakat tentang urgensi pariwisata berkelanjutan dan memperkuat identitas desa sebagai tujuan wisata yang ramah lingkungan (Harisandi & Anshory, 2019).

Kesepuluh, penelitian dengan judul “Tinjauan Kolaboratif dalam Mendorong Pengembangan Desa Wisata Lapasi di Maluku Utara” ditulis oleh Abdul Halil Hi Ibrahim, Syaiful Madjid, Muhlis Hafel. Dengan hasil kajian literatur menunjukkan peningkatan Desa Wisata Lapasi di Maluku Utara berhasil karena kolaborasi efektif antara negara, komunitas, dan pengusaha. Penelitian kualitatif menggunakan Nvivo12 Plus mengungkap fokus kolaborasi pada pembinaan desa wisata, pelestarian lingkungan, infrastruktur, dan peningkatan ekonomi lokal. Sinergi ini berdampak positif pada perkembangan dan kekuatan saing desa wisata, menjadi model inspiratif untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan dan inklusif di daerah lain (Ibrahim et al., 2024).

Berdasarkan analisis terhadap penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa banyak studi yang telah dilakukan lebih fokus pada

penguatan kelembagaan desa wisata, baik melalui pendampingan masyarakat (Isa dan Praswati, 2023), kampanye kesadaran wisata (Sulistyo et al. , 2023), pelatihan manajemen dan studi perbandingan (Lailam et al. , 2019), maupun analisis SWOT untuk pengembangan daya tarik wisata (Hastuti et al. , 2023). Beberapa penelitian lain menyoroti pentingnya lembaga lokal dalam memberdayakan sumber daya desa wisata (Aliim dan Darwis, 2024), peningkatan kelembagaan BUMDes melalui pembuatan laporan keuangan (Pesik et al. , 2024), serta perancangan lembaga menggunakan kerangka kerja IAD (Rohman dan Prantama, 2023). Sebaliknya, studi mengenai manajemen inovasi dalam pelayanan publik (Hapzah et al. , 2020), desa wisata pendidikan berbasis hidroponik (Harisandi dan Anshory, 2019), serta kerjasama antara berbagai pihak dalam pengembangan desa wisata (Ibrahim et al. , 2024) menekankan signifikansi inovasi, keterlibatan masyarakat, dan kolaborasi antar aktor.

Walaupun demikian, masih ada area penelitian yang belum banyak dijelajahi, yaitu bagaimana inovasi kelembagaan BUMDes secara khusus dapat berfungsi sebagai alat strategis dalam memajukan ekonomi lokal di wilayah desa wisata. Penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan pada aspek penguatan organisasi, penyusunan laporan keuangan, serta kolaborasi antar aktor. Namun, belum ada analisis yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk inovasi kelembagaan pada BUMDes yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan meneliti inovasi kelembagaan BUMDes dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Desa Wisata Torongrejo, Kota Batu. Tujuan penelitian tidak hanya terpusat pada penguatan lembaga, tetapi juga pada cara inovasi yang dilakukan oleh BUMDes dapat meningkatkan kompetisi unit usaha setempat, memberikan kekuatan kepada komunitas desa secara terus-menerus, berperan sebagai pendorong dalam mengintegrasikan ekonomi desa dengan sektor pariwisata, serta menjadi contoh pengembangan lembaga yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, dan keinginan para wisatawan.

Oleh karena itu, studi ini memberikan sumbangan baru dalam literatur tentang kelembagaan BUMDes, yaitu menekankan bahwa inovasi kelembagaan berperan penting dalam memperkuat ekonomi lokal desa wisata.

B. Kajian Teori

1. Inovasi Kelembagaan

Inovasi berasal dari kata latin “*innovation*”, yang berarti perubahan dan pembaharuan, dan kata latin “*innovo*”, yang berarti mengubah atau memperbaharui. Inovasi didefinisikan sebagai perubahan baru yang menghasilkan peningkatan. Oleh karena itu, inovasi adalah memasukkan cara atau teknik baru ke dalam input dan output yang akan menghasilkan perubahan yang berhasil dalam bidang sosial maupun ekonomi. Inovasi adalah perubahan baik proses maupun produk, dan inovasi kelembagaan diperlukan karena membentuk cara keputusan dibuat tentang apa yang harus diubah. Institusi terdiri dari hak, aturan, dan prosedur (Young et al., 2008), yang memengaruhi cara orang-orang yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan berinteraksi satu sama lain (Patterson, 2018). Menurut Khairul Muluk dalam Retnowati WD Tuti (2017), ada lima kategori inovasi yang ada di sektor publik:

- a. Inovasi produk atau layanan: pengembangan atau penyempurnaan bentuk dan desain produk atau layanan yang ada.
- b. Inovasi dalam proses pelayanan: pembaruan yang terus-menerus terkait perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan.
- c. Inovasi metode pelayanan: perubahan cara interaksi dengan pelanggan atau penawaran layanan baru.
- d. Inovasi Kebijakan: Menunjukkan tujuan, visi, dan strategi yang berbeda.
- e. Inovasi Sistem: Metode baru atau diperbarui untuk berinteraksi dengan pihak lain, atau perubahan dalam struktur pemerintahan.

Kelembagaan adalah kumpulan aturan yang diterima, dipatuhi, dan diterapkan oleh masyarakat, serta memberikan ruang bagi anggotanya (Santoso & Darwanto, 2015). Berbagai lembaga, baik pemerintah, daerah, swasta, maupun masyarakat, dengan sumber daya manusia, aturan, dan sistem operasional yang efisien di bidang pariwisata terdiri dari kumpulan elemen dan jaringannya yang diorganisasi secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan di bidang pariwisata. Untuk sukses pengembangan desa wisata, pengelolaan desa wisata dan manajemen organisasi sangat krusial. Kelembagaan pariwisata adalah kumpulan elemen dan mitra yang disusun secara terorganisir, seperti pemerintah setempat, wirausahawan, warga, serta aturan dan prosedur operasional. Organisasi ini terus berkembang untuk mencapai tujuan pariwisata (Sihombing, 2023).

Organisasi biasanya dianggap sulit untuk diubah. Tidak hanya reformasi kebijakan yang sering sulit, tetapi budaya organisasi yang kuat dan gagasan yang diterima umum juga sering membutuhkan waktu untuk berubah. Inovasi kelembagaan merujuk pada upaya menciptakan atau memperbarui struktur, sistem, dan proses dalam suatu organisasi agar lebih adaptif terhadap perubahan. Dalam konteks BUMDes, inovasi kelembagaan bertujuan untuk memperkuat peran lembaga dalam pengelolaan potensi aspek ekonomi, sosial, dan budaya di desa. Proses ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektifitas lembaga dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi pasca pandemi covid- 19 (Pesik et al., 2024).

Inovasi Kelembagaan berakar pada prinsip inklusivitas, yang berarti mengikutsertakan semua pihak di desa dalam proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan program. Dengan partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat, BUMDes dapat lebih memahami kebutuhan spesifik dan merancang solusi sesuai dengan konteks lokal. Inklusivitas ini juga mendorong rasa kepemilikan

masyarakat terhadap inovasi yang diterapkan, sehingga keberlanjutan lebih terjamin. Selain itu, prinsip inklusivitas memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan, terutama kelompok rentan seperti perempuan. Kolaborasi menjadi elemen kunci lainnya yang mendukung keberhasilan inovasi kelembagaan. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, LSM, dan sektor swasta, BUMDes dapat memperluas jaringan dan mendapatkan dukungan dalam bentuk sumber daya, pelatihan, dan akses pasar. Prinsip berkelanjutan juga sangat penting, karena inovasi yang diterapkan harus dirancang untuk memberikan manfaat jangka panjang. Dengan memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, BUMDes dapat menciptakan sistem yang lebih tangguh dalam menghadapi tantangan masa depan (Rohman & Prantama, 2023).

Strategi implementasi inovasi kelembagaan dimulai dengan restrukturisasi organisasi BUMDes. Langkah ini melibatkan pembentukan divisi-divisi baru yang fokus pada tugas tertentu, seperti pemasaran, pengelolaan aset, dan pengembangan produk. Restrukturisasi ini memberikan kejelasan peran bagi setiap anggota organisasi, sehingga meminimalkan BUMDes untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika pasar. Dalam proses restrukturisasi, penting untuk melibatkan semua pihak terkait untuk menciptakan rasa tanggung jawab bersama (Rohman & Prantama, 2023).

Kolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah desa, pemerintah daerah menjadi langkah awal untuk memperkuat inovasi kelembagaan. Pemerintah dapat memberikan dukungan regulasi dan pendanaan yang memadai untuk membantu BUMDes menjalankan fungsinya dengan optimal. Selain itu, kerjasama dengan pemerintah memungkinkan akses ke berbagai program pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga resmi. Hubungan yang baik dengan pemerintah juga membuka peluang

untuk integrasi program BUMDes dengan kebijakan pembangunan desa secara keseluruhan. Kolaborasi dengan komunitas lokal dan sektor swasta juga menjadi elemen penting dalam inovasi kelembagaan (Lisdawati et al., 2024) .

Komunitas lokal dapat berperan aktif dalam menyediakan masukan tentang kebutuhan dan potensi desa, sementara sektor swasta dapat mendukung dalam bentuk investasi, pemasaran, atau kemitraan strategis. Melalui kolaborasi yang erat BUMDes dapat menciptakan paket wisata terpadu, produk lokal yang kompetitif, atau program-program lain yang mendukung penguatan ekonomi lokal. Sinergi antara semua pihak ini akan meningkatkan daya saing desa dan menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas (Hapzah et al., 2020).

2. Penguatan Ekonomi Lokal

Menurut KBBI, "penguatan" berarti proses, cara, atau perbuatan yang menguatkan atau menguatkan. Penguatan juga dapat berarti mengembangkan atau meningkatkan sesuatu untuk menjadi lebih baik dari apa yang ada. Dalam buku pembangunan ekonomi, Musa Asy'ari menyatakan penguatan ekonomi mengacu pada upaya memperkuat faktor produksi, distribusi, dan pemasaran, sekaligus meningkatkan pendapatan yang layak serta akses masyarakat terhadap informasi, pengetahuan, dan keterampilan diperlukan untuk berbagai aspek masyarakat sendiri dan kebijakannya (Ramadhan, 2018).

Ekonomi masyarakat terdiri dari seluruh aktivitas ekonomi dan usaha masyarakat dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, layanan kesehatan, dan pendidikan menjadi fokus utama. Penguatan ekonomi bertujuan memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri dan sejahtera. Secara ringkas, hal ini melibatkan pembentukan komunitas, pengembangan kapasitas individu, serta perubahan perilaku. Penguatan ekonomi masyarakat bertujuan meningkatkan kendali atas

produksi, distribusi, pemasaran, dan konsumsi barang, serta memastikan pendapatan yang layak bagi kebutuhan dasar. Langkah ini bertujuan menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik (Rostin et al., 2022).

Potensi ekonomi lokal merujuk pada “Potensi ekonomi lokal yang layak dikembangkan dapat menjadi sumber penghidupan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan” (Salmah et al., 2024). Pengembangan sektor unggulan daerah dirancang sesuai visi dan misi yang tercantum dalam RPJPD dan RPJMD. Dokumen ini menekankan program-program prioritas kabupaten/kota untuk memperkuat sektor unggulan. Selain itu, RPJPD dan RPJMD diharapkan mencerminkan tujuan dan program strategis demi optimalisasi potensi daerah melalui perencanaan pembangunan (Suparmoko, 2020).

Pengembangan ekonomi lokal dapat didefinisikan sebagai proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat didorong untuk mengoptimalkan penggunaan potensi sumber daya lokal, yang diharapkan dapat menghasilkan peningkatan kecil dalam pengembangan perekonomian. Oleh karena itu, pentingnya pengembangan ekonomi lokal terletak pada kemampuannya menciptakan peluang kerja baru sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi (Mandhaputri et al., 2023).

Gunawan Sumodiningrat menyarankan beberapa langkah strategi untuk mendukung penguatan perekonomian masyarakat.

- a. Memberikan akses lebih luas terhadap produksi, yang dapat meningkatkan output, pendapatan, dan tabungan untuk pemupukan modal berkelanjutan.
- b. Memperkuat transaksi dan hubungan kemitraan ekonomi rakyat melalui sarana yang mempermudah pemasaran, membangun rasa kebersamaan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab.

- c. Meningkatkan kualitas SDM dengan memperbaiki layanan pendidikan dan kesehatan. Kesehatan adalah faktor penting dalam menentukan produktivitas, dengan pengetahuan yang didapat dari pendidikan dan pelatihan.
- d. Industrialisasi bergerak ke pedesaan dengan memanfaatkan potensi lokal; kebijakan industri harus fokus pada penguatan sektor industri rakyat yang terhubung dengan industri besar.
- e. Kebijakan ketenagakerjaan harus mendukung perkembangan tenaga kerja mandiri melalui wirausaha baru yang tumbuh menjadi usaha kecil menengah yang saling mendukung.
- f. Karena ekonomi nasional tersebar di seluruh negara, ada pemerataan pembangunan antar daerah.

BUMDes memiliki peran vital sebagai motor penggerak utama dalam pembangunan ekonomi lokal. Sebagai lembaga ekonomi yang dikelola langsung oleh desa, BUMDes berfungsi sebagai wadah yang mampu memanfaatkan potensi desa secara optimal untuk menciptakan nilai tambah. Dalam perannya, BUMDes tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan, BUMDes mendorong keterlibatan aktif dalam pengelolaan wisata, sehingga hasil yang dicapai dapat dirasakan secara merata. Dalam konteks pariwisata, BUMDes berperan penting dalam mengelola potensi wisata desa untuk menarik lebih banyak pengunjung. misalnya BUMDes dapat mengembangkan paket wisata berbasis kearifan lokal atau memperbaiki infrastruktur wisata agar lebih menarik dan mudah diakses. Dengan tata kelola yang baik, BUMDes tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan desa melalui sektor wisata, tetapi juga menciptakan sinergi antara berbagai pihak, seperti pelaku usaha lokal, komunitas budaya, dan pemerintah daerah (Haryati, 2018).

3. Desa Wisata

a. Definisi Desa Wisata

Desa wisata merupakan desa yang memiliki keunikan dan daya tarik khas, baik dari alam maupun budaya, yang dikelola dengan pengembangan fasilitas wisata (Atmoko, 2014). Pengembangan desa wisata diharapkan dapat menciptakan pemerataan sesuai dengan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan. Desa wisata memberikan nilai budaya pedesaan pada produk wisata, sehingga pengembangannya tetap menjaga kelestarian budaya. Menurut Astuti (2012) Desa wisata adalah desa yang mempertahankan keaslian sosial, budaya, dan struktur ruangnya, yang bisa dijadikan daya tarik wisata. Wilayah ini mengelola kearifan lokal, seperti adat, potensi, dan budaya, untuk mendukung kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat (Hermawan, 2016).

Dari pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa desa wisata adalah desa dengan kearifan lokal yang unik, yang dikembangkan sebagai daya tarik untuk menarik wisatawan (Wihasta, 2016).

b. Komponen-Komponen Desa Wisata

Menurut Nuryanti (1993) dalam Prakoso dkk. (2012), ada dua elemen utama dalam komponen desa wisata, yakni:

- 1) Akomodasi, yaitu bagian dari rumah penduduk lokal yang berfungsi sebagai tempat penginapan.
- 2) Atraksi, yaitu kegiatan sehari-hari penduduk yang memungkinkan wisatawan ikut berpartisipasi.

Karyono (1997) dalam Atmoko (2014) menyatakan bahwa unsur-unsur desa wisata meliputi:

- 1) Tempat wisata yang menarik bagi pengunjung, seperti kekayaan alam, budaya, hiburan, dan layanan lainnya.
- 2) Fasilitas yang mendukung, seperti hotel, restoran, toko *souvenir*, serta sistem pengelolaan sampah dan limbah.

- 3) Akses transportasi yang memudahkan wisatawan.
- 4) Potensi alam dan budaya yang mendukung pariwisata.
- 5) Partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keamanan.
- 6) Dukungan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan aman.

Desa wisata memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal melalui penciptaan peluang kerja dan usaha bagi masyarakat setempat. Aktivitas utama seperti penyewaan homestay memberikan pendapatan langsung kepada pemilik rumah, sementara wisatawan yang menginap juga menciptakan permintaan tambahan bagi usaha lokal seperti toko kelontong atau warung makan. Selain itu, banyak desa wisata menawarkan jasa pemandu lokal, memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengetahuan tentang sejarah, budaya, atau keindahan alam desa, sekaligus mendapatkan penghasilan. Desa wisata juga memicu kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berbasis potensi lokal (Nining Asniar Ridzal & Waode Adriani Hasan, 2019). Produk khas desa, seperti makanan tradisional, kerajinan tangan, dan hasil pertanian organik, menjadi komoditas yang diminati wisatawan. UMKM tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat budaya lokal desa. Dengan memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas melalui pariwisata, produk lokal dipasarkan ke luar daerah, bahkan mencapai pasar internasional. Ini menjadikan desa wisata sebagai platform untuk memberdayakan UMKM dan memperluas jaringan pemasaran (Harisandi & Anshory, 2019).

Strategi pengelolaan desa wisata dimulai dengan perencanaan yang matang termasuk pemetaan potensi desa, identifikasi segmen pasar, dan penentuan target wisatawan. Langkah ini membantu desa memahami kekuatan dan

kelemahan mereka serta merancang strategi pengembangan yang tepat. Selain itu, pelatihan bagi masyarakat menjadi prioritas penting. Pelatihan tersebut mencakup ketrampilan pelayanan pelanggan, manajemen usaha wisata, hingga pelestarian budaya. Dengan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, masyarakat desa dapat lebih percaya diri dan profesional dalam pengelolaan destinasi wisata. Keberadaan desa wisata memberikan dampak ekonomi yang signifikan, seperti meningkatnya pendapatan masyarakat melalui usaha-usaha lokal (Husni et al., 2024). Penciptaan lapangan kerja baru, baik secara langsung maupun tidak langsung membantu mengurangi pengangguran dan memperbaiki taraf hidup masyarakat. Pengelolaan wisata berbasis ekowisata mendorong pelestarian alam melalui aktivitas seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan konservasi sumber daya air. Wisata berbasis alam yang ramah lingkungan. Selain itu, hal ini juga menarik minat wisatawan modern yang peduli terhadap isu berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan konsep berkelanjutan dalam pengelolaan, desa wisata dapat berfungsi sebagai model pembangunan yang juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian untuk generasi mendatang (Ibrahim et al., 2024).

4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes merupakan suatu lembaga yang menggunakan modal dari desa sendiri, baik seluruhnya maupun sebagian besar. Modal itu berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan secara terpisah. Adanya BUMDes diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan tersebut menyatakan bahwa BUMDes bertugas untuk memperkuat perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memaksimalkan potensi lokal secara berkelanjutan.

Menurut Wulandari (2024), BUMDes tidak hanya menjadi lembaga ekonomi tapi juga sebagai wadah sosial yang membantu meningkatkan kemandirian masyarakat desa melalui pemberdayaan melalui pelayanan, pengembangan usaha, dan pengembangan jaringan ekonomi. Dengan demikian, BUMDes bisa menjadi penggerak utama dalam pembangunan desa yang melibatkan seluruh masyarakat.

BUMDes memiliki beberapa prinsip utama dalam pengelolaannya, yaitu:

- a. Kemandirian yang berarti BUMDes diatur dan dikelola oleh desa sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, tanpa bergantung sepenuhnya pada pihak luar.
- b. Profesionalisme yang mencakup manajemen yang transparan, bisa dipertanggungjawabkan, serta mengikuti sistem organisasi yang jelas.
- c. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat desa sebagai pemilik maupun penerima manfaat dari usaha BUMDes.
- d. Sosial dan komersial artinya BUMDes tidak hanya mementingkan keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan manfaat sosial bagi masyarakat (Hastuti et al., 2023).

Dalam konteks pembangunan desa wisata, BUMDes berfungsi sebagai lembaga pengelola yang mampu menyatukan berbagai potensi lokal, seperti sektor pariwisata, UMKM, serta pelayanan publik. Menurut Purbathin Hadi (2020), keberhasilan desa wisata sangat bergantung pada tata kelola BUMDes yang baik, karena lembaga ini bertindak sebagai koordinator yang menghubungkan pemerintah desa, masyarakat, serta sektor swasta.

Strategi pengembangan BUMDes mencakup beberapa aspek, seperti:

- a. Diversifikasi usaha dengan menambah unit usaha baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi lokal, seperti pengelolaan wisata, pertanian, perdagangan, atau layanan

keuangan mikro.

- b. Penguatan SDM dengan memberikan pelatihan dalam manajemen, kewirausahaan, dan keterampilan teknis yang mendukung daya saing usaha.
- c. Kolaborasi *multi-stakeholder* yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga pendamping, serta mitra swasta untuk memperkuat modal sosial, akses pasar, serta inovasi kelembagaan (Hastuti et al., 2023).

Dengan pengelolaan yang baik, BUMDes bisa menjadi alat penting untuk mengurangi ketimpangan pembangunan desa, meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Lebih lanjut, BUMDes juga membantu mendorong desa menjadi lebih mandiri dan berkelanjutan, terutama setelah pandemi yang memaksa sektor ekonomi pedesaan untuk beradaptasi dan berinovasi (Triyo et al., 2020).

C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan menyajikan bukti empiris sebagai data Inovasi Kelembagaan Untuk Pengembangan Ekonomi Lokal Di Desa Torongrejo, Batu. Kerangka berpikir ini berfungsi untuk menyederhanakan pemahaman terhadap masalah yang diteliti.



GAMBAR 2.1 KERANGKA BERPIKIR